















Budidaya laut meliputi ikan kerapu, rumput laut, ikan karang dan ikan hias. Potensi sumberdaya pesisir dan laut lainnya adalah potensi mangrove seluas  $\pm$  1 Ha dan terumbu karang yang terdapat di Desa Berakas.

Bidang lain yang tidak kalah pentingnya dari penangkapan dan budidaya adalah pengolahan hasil perikanan. Potensi sub sektor pengolahan terdiri dari pengawetan ikan dan pengolahan hasil laut lainnya.

#### 9) Pendidikan

Pendidikan yang ada di pulau Raas memang tidak seperti pendidikan-pendidikan yang ada di kota, karena dari tenaga gurunya sangat sedikit sekali dan itupun jarang tenaga guru pengajar yang dari kota soalnya guru-guru yang di tugaskan ke pulau Raas banyak yang tidak mau karena takut untuk menyeberangi lautan yang menuju ke pulau Raas, di samping berbahaya karena alat tranportasinya memakai Perahu, dan belum lagi kalau musim angin.

Tetapi kalau di lihat dari pendidikan agamanya sangatlah baik di bandingkan orang kota, karena di pulau Raas kebanyakan Madrasa dinia dari pada sekola umum.













Program Regenerasi Nelayan merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pemberian pengetahuan, keterampilan dan kecakapan kepada generasi muda/anak nelayan sehingga memiliki kapasitas lebih dibanding pendahulunya.

Program regenerasi nelayan ini dilakukan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga diharapkan para generasi muda/anak nelayan mampu mengembangkan akses permodalan, pasar dan teknologi, serta mampu mendorong masyarakat pesisir umumnya untuk meningkatkan kapasitas usahanya dengan memanfaatkan teknologi terapan.

Pemberdayaan Perempuan Pesisir merupakan penguatan kapasitas para perempuan di wilayah pesisir untuk mampu mengembangkan dan meningkatkan potensi perempuan pesisir agar keterlibatan mereka dalam kegiatan perikanan dapat lebih optimal dan dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi kehidupan perempuan pesisir. berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan kegiatan usaha yang dilakukan secara berkelompok.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan kegiatan pelatihan yang ditujukan kepada para pengelola LKM Swamitra Mina untuk penguatan lembaga keuangan mikro sehingga dapat meningkatkan profesionalitas dan pelayanan bagi nasabah khususnya masyarakat pesisir.







mendayagunakan potensi alam dan potensi penduduk lokal, sehingga cenderung mematikan inisiatif lokal.

Melalui program PEMP, dimana masyarakat pesisir dengan wadah kelompok mempunyai kebebasan untuk memilih, merencanakan dan menetapkan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan berdasarkan musyawarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program PEMP dan mengukur tingkat keberhasilan proses pelaksanaan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan pelaksanaan program PEMP. Untuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program PEMP tersebut terdiri dari faktor komunikasi dan faktor sikap pelaksana.

Tingkat kehadiran dan keaktifan masyarakat selama pelaksanaan program sudah berjalan dengan semestinya atau dengan kata lain sudah baik, tingkat penerimaan dan kepuasan masyarakat baik namun untuk penguatan kelembagaan masyarakat lokal melalui lembaga yang terbentuk yaitu Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) tidak berhasil dilaksanakan dengan baik. Untuk faktor yang sangat dominan mempengaruhi keberhasilan program tersebut adalah faktor sikap pelaksana dan disusul dengan faktor komunikasi.

Program PEMP meliputi beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari program besar PEMP. Beberapa kegiatan tersebut adalah :











rintangan dan kemandekan yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan minimnya sumber daya yang ada baik individu maupun kelompok yang menyebabkan masyarakat resah dan menimbulkan keterbelakangan pada masyarakat kepulauan Raas.

Proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dirasa tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman yang semakin modern, hasil inilah yang menguatkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini selalu berinovatif memberikan yang terbaik kepada masyarakat kepulauan Raas untuk lebih maju dan berkembang.

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat kepulauan Raas melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dijadikan sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat lebih-lebih menjawab tantangan zaman yang serba modern ini, kalau dilihat dari perjalanannya sangat bertumpu pada sosok figur tokoh agama setempat dan kebersatuan masyarakat untuk selalu mengembangkan kepulauan Raas yang penuh dengan nilai-nilai agama.

Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) diarahkan kepada perbaikan kondisi hidup masyarakat, dalam artian memberi tekanan pada Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik yang salah satunya dilakukan melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan.

Kemiskinan, kemelaratan, keterbelakangan, dan kebobrokan dari sebuah kebijakan itu sendiri yang menurunkan kualitas dan melemahkan semangat serta kemampuan masyarakat di kepulauan Raas, itu sebabnya program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) ini berkembang pesat dengan mengutamakan partisipasi masyarakat penuh dengan melihat kenyataan dan mendengarkan keluh kesah masyarakat kepulauan Raas dan mendorong proses pembangunan desa yang efektif.

Penggerakan partisipasi masyarakat yang ada di desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri dalam artian sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama dan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Dalam hal ini, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat kepulauan Raas melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) ini adalah partisipasi yang sifatnya vertikal dan horisontal masyarakat,



dalam artian partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan mana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien.

Sedangkan partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, diman setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

Dalam usaha menempatkan pembangunan kawasan pesisir berbasis masyarakat dan potensi sumber daya alam setempat, maka kebijakan pembangunan kelembagaan memainkan peranan kunci sebagai simpul dari kebijakan pembangunan ekonomi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Kita tahu bahwa, kelembagaan sosial sebagai instrumen perubahan bagi masyarakat dan pembangunan kawasan akan memainkan peranan yang sangat signifikan jika seluruh komponen masyarakat khususnya para pengelola kelembagaan sosial tersebut senantiasa menyamakan kehesivitas sosial, tanggung jawab kolektif, transparansi, solidaritas sosial, dan altruisme.

Sosialisasi nilai-nilai sosial budaya tersebut untuk mengembangkan dan memperkuat Rasa saling percaya (*Trust*) dan sekewajiban dalam membangun masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan unsur-unsur esensial





Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di kepulauan Raas dengan semangat perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat itu ke dalam kehidupan bangsa, dan memampukan mereka untuk memberi sumbangan sepenuhnya bagi kemajuan nasional menuju suatu proses dimana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan mereka, merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya karena pembangunan masyarakat ditujukan kepada upaya untuk mengurangi kemiskinan, kemelaratatan, dan kebobrokan lingkungan hidup masyarakat.

Dalam konteks pembangunan masyarakat di kawasan pesisir terdapat tiga komponen kebijakan strategis yang terintegrasi, yaitu :

- a. Kebijakan pembangunan ekonomi.
- b. Kebijakan sumber daya alam dan lingkungan.
- c. Kebijakan kelembagaan.

Kebijakan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan potensi dan produktivitas ekonomi sektor pesisir, kelautan, dan perikanan. Kebijakan ini mencakup peningkatan investasi, nilai tukar harga, ketenaga kerjaan, dan peningkatan ekspor.

Kebijakan sumber daya alam dan lingkungan bertujuan membangun ekosistem pesisir dan lautan secara optimal, sehingga memberikan kemaslahatan sosial secara lestari. Kebijakan ini mencakup isu-siu

penataan ruang (wilayah), peningkatan produktivitas kompilasi sumber daya, dan pengendalian kerusakan.

Sedangkan kebijakan pembangunan kelembagaan bertujuan membangun mekanisme pengaturan alokasi sumber daya, mengorganisasikan kepentingan masyarakat dan pemerintah, serta memberi kepastian hukum beserta implimentasi penegakannya.

Sepanjang kita menempatkan pembangunan masyarakat pesisir berbasis masyarakat dan potensi sumber daya alam setempat, kebijakan pembangunan kelembagaan memainkan peranan kunci sebagai simpul dari kebijakan pembangunan ekonomi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sinergitas ketika kebijakan strategis pembangunan tersebut tidak hanya berpotensi mencapai tujuan-tujuan pembangunan sesuai dengan alur perencanaan program yang telah ditetapkan, tetapi juga akan mampu menjamin kelangsungan proses pembangunan dan eksistensi masyarakat peisir.

Hakekat pemberdayaan masyarakat sudah harus digeser kearah upaya-upaya terencana untuk menyiapkan tatanan-tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang baru menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang sangat cepat dari pada hanya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Terbukti bahwa keberhasilan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang pada awalnya menemukan kegagalan dalam proses pelaksanaannya yang mengakibatkan lambatnya

pemberdayaan di kepulauan Raas Kabupaten Sumenep. Saat ini sudah menemukan bentuk yang pas agar dapat diterima di masyarakat.

Kelangsungan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam pengembangan masyarakat kepulauan Raas Kabupaten Sumenep untuk memfasilitasi atau sebagai instrumen dalam pengorganisasian masyarakat adalah dengan membentuk pinjaman modal, pinjaman modal nelayan, pelatihan-pelatihan, dan penyediaan pupuk merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan masyarakat atau komunitas.